

HAKIKAT KERJA SAMA DALAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Agung Setiabudi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: agung.setiabudi18@gmail.com

***Abstract:** Education is very important in all aspects of life, both formal, non-formal and informal. Therefore, high-quality education is needed to develop quality human beings. Unfortunately, the current state of education shows the opposite. Curriculum mismatches, scarcity of high-quality resources, inadequate infrastructure, low levels of attainment, and lack of coordination among stakeholders all hinder problems that hinder the improvement of the quality of education. It requires the direct participation and cooperation of all stakeholders to achieve the common goal of improving the quality of education. In other words, genuine collaboration is needed to ensure that no function overlaps with another. Government, community, and schools are stakeholders in the world of education. What is meant by "community" is parents and the surrounding environment. While school is used to refer to students, lecturers, and administrators. This presentation will explore the critical nature of collaboration among all stakeholders to improve the quality of education.*

Keywords: *Quality of Education, Cooperation, Quality*

Pendahuluan

Pendidikan menjadi hal yang sangat penting di dalam semua aspek kehidupan, baik itu pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Karenanya dibutuhkan sebuah pendidikan yang berkualitas untuk dapat menciptakan individu yang berkualitas pula. Sayangnya, mutu pendidikan yang ada saat ini menggambarkan fakta yang sebaliknya. Tidak sesuai kurikulum, kurangnya kualitas sumber daya, sarana prasarana kurang memadai, tingkat prestasi rendah, dan kurangnya kerjasama antar stakeholder menjadi faktor penghambat mengapa mutu pendidikan belum dapat berkembang maju. Padahal, dibutuhkan yang namanya partisipasi langsung dan kerjasama semua stakeholder guna dapat mewujudkan tujuan bersama yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Atau dengan kata lain diperlukan kerjasama nyata agar tidak ada tumpang tindih dimasing-masing fungsi. Stakeholder yang berperan di dalam dunia pendidikan antara lain adalah pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Masyarakat merujuk pada orang tua dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Sedangkan sekolah merujuk pada siswa, tenaga pengajar, dan kepala sekolah.¹

¹ N Damayanti, "Pentingnya Kerjasama bagi Peningkatan Mutu Pendidikan," *Pendidikan*, n.d., 1–7, <https://osf.io/a6vxe/download>.

Pelaksanaan program pendidikan, lembaga pendidikan merupakan pemeran utama sebagai aktor dalam mengelola program pendidikan. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan yang telah disepakati oleh lembaga pendidikan tersebut tentunya tidak bisa terlepas dengan persoalan yang harus diselesaikan oleh sebuah lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, sebuah lembaga pendidikan haruslah memiliki sebuah strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan guna mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dalam menentukan strategi yang tepat peran stakeholder lembaga pendidikan tidak dapat terlepas dari pelaksanaan pendidikan yang semestinya. Stakeholder tidak hanya sebagai input dari lembaga pendidikan itu sendiri, tetapi ikut berperan dalam proses pendidikan. Berkaitan dengan strategi yang tepat serta kondisi stakeholder maka perlunya diciptakan sebuah hubungan simbiosis mutualistis yang dilakukan oleh keduanya dalam mencapai dan mewujudkan tujuan pendidikan bersama. Bentuk hubungan tersebut berupa kerjasama atau kemitraan.² Bahkan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan menyatakan bahwa setiap sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan.³ Kerjasama sekolah dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah seperti perguruan tinggi, sekolah yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri di lingkungannya.

Hakikat seorang pendidik kaitannya dalam pendidikan Islam adalah mendidik dan sekaligus di dalamnya mengajar sesuai dengan keilmuwan yang dimilikinya. Secara umumnya pendidik adalah orang yang memiliki tanggungjawab mendidik. Bila dipersempit pengertian pendidik adalah guru yang dalam hal ini di suatu lembaga sekolah. Sedangkan pengajar adalah pendidik yang baik.⁴ Adapun hakekat pendidik adalah Allah SWT yang mengajarkan ilmu kepada manusia dan manusia pula yang mempunyai sebuah kewajiban baginya untuk mentransferkan ilmu itu kepada orang lain demi kemaslahatan ummat, hakekat peserta didik merupakan individu yang akan dipenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan, sikap dan tingkah lakunya, karena peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran.

Metode Penelitian

Bersumber pada paradigma pemasaran jasa pendidikan, metodologi ilmiah tercantum dalam metode penelitian pustaka (Library Research) , ialah sesuatu metode penelitian yang tidak hanya menjadi keahlian berpikir secara logis namun dilanjutkan dengan aksi penelitian, pemantauan, serta bentuk-bentuk metode yang diketahui dengan metodologi ilmiah semacam kualitatif, kuantitatif, serta mix methode.⁵

² Yulanda Elis Meyana et al., “Kerja Sama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Dengan Lembaga Lain Bidang Kejuruan,” *Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2017): 157–65.

³ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan

⁴ M Ramli, “Hakikat pendidikan dan peserta didik,” *Tarbiyah Islamiyah* 5, no. 1 (2015): 61–85, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tiftk/article/view/1825>.

⁵ Muqowim Fitria Wulandari, Tatang Hidayat, “Konsep Pendidikan Holistik Dalam Membina Karakter Islam,” *Murobbi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2021): 157–80.

Dengan hal ini penelitian juga dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok pembahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

Dalam penulisan ini penulis menerapkan metode penelitian penelitian pustaka karena setidaknya ada alasan yang mendasarinya. Yaitu, bahwa sumber data tidak selalu bisa didapatkan dilapangan, ada halnya sumber penelitian bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen dalam bentuk tulisan, baik halnya dari jurna, buku maupun literatur yang lainnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Kerja Sama

Pada dasarnya kerja sama adalah aktivitas yang ditujukan dalam bentuk kerja kelompok antar lembaga yang mana didalamnya terdapat perbedaan pendapat dan dapat menyatukan pendapat tersebut menjadi satu. Roucek dan Warren mengatakan bahwa kejasama berarti kerja bersama-sama untuk mencapai tujuan Bersama. Kerjasama melibatkan pemberian tugas dimana setiap anggotanya mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan bersama dengan hasil yang maksimal. Menurut Charles Horton Cooley kerjasama timbul apabila seseorang menyadari bahwa mereka yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi fakta yang paling penting dalam kerja sama yang berguna. Kerjasama memberikan manfaat bagi setiap individu dan kelompok.⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kerjasama merupakan sesuatu yang ditangani oleh beberapa pihak. Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Landsberger kerjasama atau belajar bersama adalah proses berkelompok dimana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Selain itu kemampuan kerjasama mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berinteraksi, serta melatih peserta didik beradaptasi dengan lingkungan baru.⁷

Dalam dunia pendidikan, keterampilan kerjasama merupakan hal penting yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran. Kerjasama dapat mempercepat tujuan pembelajaran, sebab pada dasarnya suatu komunitas belajar selalu lebih baik hasilnya dari pada beberapa individu yang belajar sendiri-sendiri. Dalam dunia pendidikan, keterampilan kerja sama merupakan hal penting yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran, baik di dalam maupun di luar sekolah. Kerja sama dapat mempercepat tujuan pembelajaran, sebab pada dasarnya suatu komunitas belajar selalu lebih baik hasilnya daripada beberapa individu yang belajar sendiri-sendiri. Seperti pepatah

⁶ Sukardi dan Sugiyanti, "Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar Berbasis Kurikulum 2013," *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran* 1, no. 1 (2016): 146–58.

⁷ Swastika Sari dan Astuti Wijayanti, "Talking Stick: Hasil Belajar IPA Dan Kemampuan Kerjasama Siswa," *WACANA AKADEMIKA: Majalah Ilmiah Kependidikan* 1, no. 2 (2017): 175–84, <https://doi.org/10.30738/wa.v1i2.1642>.

mengatakan dua kepala lebih baik daripada satu kepala, yang dapat diartikan bahwa dengan adanya kerja sama, siswa dapat mengembangkan kepercayaan diri, menambah pengalaman hidup serta meningkatkan interaksi sosial yang akan membantu siswa dalam menjalani kehidupannya kelak.⁸

Secara ringkas, studi yang terkait dengan kerjasama antar lembaga yang dilakukan oleh Cavaye mengarah pada empat faktor situasional yang diindikasikan berpengaruh terhadap keefektifan kerjasama antarlembaga. Dari empat penentu tersebut adalah: *leadership, communication, trust, dan commitment*.

a. Kepemimpinan

Leadership berperan penting dalam kesuksesan organisasi. Ainoya dan Myrtle mengatakan bahwa Seorang pemimpin organisasi dapat menciptakan image yang positif terkait dengan respons terhadap suatu kondisi yang dinilai kritis. Oleh karena itu, leadership mempunyai pengaruh positif terhadap proses pengelolaan hubungan antar lembaga, Elaborasi variabel leadership juga akan berpengaruh positif terhadap outcomes yang diharapkan dari hubungan antarlembaga.

b. Komunikasi

Bovee dan Till berpendapat Komunikasi yang terbuka merupakan faktor yang sangat penting dalam kesuksesan koordinasi interagency. Kemampuan berkomunikasi akan meningkatkan produktivitas baik individu maupun organisasi. Selanjutnya variabel communication mempunyai pengaruh positif terhadap interagency processes.

c. Kepercayaan

Kepercayaan (trust) merupakan hal yang sangat penting untuk hubungan yang melibatkan beberapa pihak termasuk bagi keefektifan kerjasama interorganisasional dalam situasi emergensi. Ellmer et al dalam penelitian koordinasi interagency pelayanan kesehatan mental di Texas menyebutkan kepercayaan meningkatkan keefektifan dalam proses pemecahan masalah (process inter agency) serta meningkatkan keefektifan pelayanan (outcomes).

d. Komitmen

Ring dan deVen mengemukakan kepercayaan dan komitmen sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan hubungan interorganisasional. Komunikasi. Morgan dan Hunt mengatakan kepercayaan dan komitmen sebagai faktor situasional mempunyai hubungan yang positif terhadap proses kerjasama.⁹

2. Karakteristik Kerja Sama

Kerjasama Tim (Team Work), kerjasama tim merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen mutu terpadu. Tim adalah sekelompok orang bekerja secara bersama-sama dan memiliki tujuan bersama yaitu untuk memberikan kepuasan kepada seluruh stakeholders. Kerja tim dalam sebuah organisasi merupakan

⁸ Ita Rosita dan Leonard Leonard, "Meningkatkan Kerja Sama Siswa Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share," *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA* 3, no. 1 (2015): 1–10, <https://doi.org/10.30998/formatif.v3i1.108>.

⁹ Hargo Utomo Hadi Purnomo, "Keefektifan Kerjasama Antarlembaga Dalam Operasi Pemulihan Terhadap Bencana Alam: Studi Empiris Di Yogyakarta Dan Jawa Tengah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 23, no. 4 (2008): 404–15, <https://doi.org/10.22146/jieb.6317>.

komponen penting dalam manajemen mutu, mengingat kerja tim akan meningkatkan kepercayaan diri, komunikasi dan mengembangkan kemandirian. Kerjasama tim dalam menangani proyek perbaikan atau pengembangan mutu pendidikan merupakan salah satu dari pemberdayaan pegawai dan kelompok kerjanya dengan pemberian tanggung jawab yang lebih besar. Eksistensi kerjasama dalam sebuah lembaga pendidikan sebagai modal utama dalam meraih mutu dan kepuasan stakeholder melalui proses perbaikan mutu secara berkesinambungan.¹⁰

David mengklasifikasikan empat elemen dasar dalam kerja sama, yaitu: adanya saling ketergantungan yang saling menguntungkan pada sebuah lembaga dalam melakukan usaha secara bersama-sama. Senada dengan M.Saputra dan Rudyanto menyatakan bahwa pencapaian kerja sama menuntut beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh anggota, yaitu: adanya kepentingan yang sama, didasari oleh prinsip keadilan, dilandasi oleh sikap saling pengertian, adanya tujuan yang sama, saling membantu, saling melayani, tanggung jawab, saling menghargai, dan kompromi.¹¹

Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dasar kerja sama ialah adanya saling ketergantungan, adanya interaksi, tanggung jawab, dan kepentingan yang sama, yang mana kesemuanya itu dilandasi oleh sikap saling pengertian, saling membantu, saling menghargai, dan kompromi.

3. Manfaat Kerja Sama Dalam Lembaga Pendidikan

Pihak-pihak yang bekerjasama masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, keduanya berusaha menutupi kekurangan masing masing dengan kelebihan yang dimiliki oleh pihak lain atau pihak yang bermitra. Dengan demikian, diharapkan hasil yang dicapai dari kerjasama usaha harus lebih baik atau lebih besar dibandingkan jika dikelola sendiri tanpa kerjasama dengan pihak lain. Jika hasil yang diperoleh dari kerjasama tidak lebih baik bila seandainya tanpa kerjasama, berarti kerjasama tersebut gagal.¹²

Saputra dan Rudyanto mengatakan bahwa manfaat pembelajaran kerjasama adalah:

- a. mampu mengembangkan aspek moralitas dan interaksi sosial peserta didik karena melalui kerjasama peserta didik memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan peserta didik lain,
- b. mempersiapkan peserta didik untuk belajar bagaimana mendapatkan berbagai pengetahuan dan informasi sendiri, baik guru, teman, bahan pelajaran, atau sumber belajar yang lain,
- c. meningkatkan kemampuan peserta didik untuk bekerjasama dengan orang lain dalam sebuah kelompok,

¹⁰ Faisal Mubarak, "Faktor dan Indikator Mutu Pendidikan Islam," *Management of Education* 1, no. 1 (2020): 10–18, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/moe/article/view/342/258>.

¹¹ Nola Sanda Rekysika, upaya eningkatkan kemampuan kerja sama melalui kegiatan kerja kelompok di kelompok A TK Negeri Trukan Siwates Kaligintung Temon Kulon Progo, Skripsi Fakultas ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

¹² Muhammad Nur Hakim, "MENGEMBANGKAN LEMBAGA PENDIDIKAN (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Dlanggu Mojokerto)," *Jurnal Manajemen Pendidika Islam* 4, no. 1 (2019): 121–39, <https://doi.org/10.31538/ndh.v4i1.245>.

- d. membentuk pribadi yang terbuka dan menerima perbedaan yang terjadi, dan
- e. membiasakan peserta didik untuk selalu aktif dan kreatif dalam mengembangkan analisisnya.

Harsanto memiliki pandangan bahwa kerjasama peserta didik dapat terlihat dari belajar bersama dalam kelompok. Belajar bersama dalam kelompok akan memberikan beberapa manfaat. Manfaat tersebut mengindikasikan adanya prinsip kerjasama. Manfaat dari adanya belajar bersama dalam kelompok antara lain:

- a. belajar bersama dalam kelompok akan menanamkan pemahaman untuk saling membantu,
- b. belajar bersama akan membentuk kekompakan dan keakraban,
- c. belajar bersama akan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menyelesaikan konflik,
- d. belajar bersama akan meningkatkan kemampuan akademik dan sikap positif terhadap sekolah, dan belajar bersama akan mengurangi aspek negatif kompetisi.¹³

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat kerjasama menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan dan memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak, sehingga keuntungan atau kerugian yang dicapai bersifat proporsional, artinya sesuai dengan peran dan kekuatan masing-masing pihak.

Sebuah organisasi harus memiliki tujuan yang jelas, jika tidak maka organisasi tersebut tidak akan terarah. Manusia perlu berorganisasi dengan beberapa tujuan, menurut Karta Sapoeetra tujuan organisasi diantaranya:

- a. *Organizing* yang efektif akan menyebabkan masing-masing anggota suatu organisasi mengetahui kelompok-kelompok aktivitas apa yang dilaksanakan.
- b. Dengan *organizing* yang tepat, akan didapat ketegasan, kejelasan dalam hubungan-hubungan kerja dalam suatu organisasi.
- c. Hubungan yang tetap dan diinginkan diantara aktivitas-aktivitas dan pelaksanaan akan tercapai, organisasi ini jauh lebih besar manfaatnya dari pada sekelompok usaha-usaha individual.
- d. *Organizing* yang baik berarti juga pendelegasian wewenang dilakukan dengan mantap, sehingga mereka menerima limpahan wewenang yang dapat bertanggung jawab.
- e. *Organizing* yang efektif berarti pemanfaatan dengan sebaik mungkin komponen manusia dan hubungan yang tepat antara pekerjaan tertentu, orang-orang, pelaksanaan dan fasilitas diteliti lebih lanjut dan diseimbangkan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh efektifitas dan efisiensi kerja.¹⁴

¹³ Ahmad Fauzi, "Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam," *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2017): 42–53, <https://doi.org/10.31538/nidhomulhaq.v2i2.31>.

¹⁴ Qurrata Akyuni, "Pengorganisasian Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2018): 95–96, <http://jurnal.serambimekkah.ac.id>.

4. Satuan Pendidikan Kerja Sama

Ruh dari nama SPK adalah adanya kerjasama antara pihak asing dengan Indonesia. Hal sudah tepat karena dengan cara ini akan dapat dijadikan kontrol atas keberadaan sekolah asing di Indonesia dan sekaligus pihak Indonesia dapat memperoleh nilai lebih yang ada pada sekolah asing. Sudah terbukti pada pengalaman sebelumnya, ketika sekolah asing berdiri secara tunggal (tidak melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan Indonesia) di dalam operasionalnya menjadi tidak terkontrol.

Di dalam Permendikbud No. 31 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa semua sekolah asing yang beroperasi di Indonesia harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan Indonesia, kecuali sekolah kedutaan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan asing yang hendak beroperasi di Indonesia harus melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan Indonesia agar keberadaannya dapat dikontrol dan pihak Indonesia memperoleh manfaat dari nilai lebih yang dimiliki oleh lembaga pendidikan asing. Namun demikian, kerjasama tersebut lebih tepat jika lembaga pendidikan Indonesia yang melakukan kerjasama adalah sekolah swasta, dan tidak diberlakukan terhadap sekolah negeri.

Permendikbud No 31 Tahun 2014, Pasal 3 menjelaskan seperti yang tertuang pada ayat (1), (2), dan (3) berikut ini:

- a. LPI dan LPA dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan pendidikan atau kerja sama pengelolaan pendidikan.
- b. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kerja sama penyelenggaraan bersama antara LPI dengan LPA untuk mendirikan SPK.
- c. Kerja sama pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kerja sama pengelolaan di bidang akademik dan/atau non-akademik antara LPI dengan LPA.

Permendikbud no 31 tahun 2014, Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5) menjelaskan sebagai berikut:

- a. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pada jalur formal dan nonformal.
- b. Pemrakarsa kerja sama penyelenggaraan pendidikan jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu LPI berakreditasi A dan LPA yang terakreditasi atau diakui di negaranya.
- c. Pemrakarsa kerja sama penyelenggaraan pendidikan jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu LPI dan LPA yang terakreditasi atau diakui di negaranya.

- d. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan jalur pendidikan formal bersifat nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pada tingkat program studi atau satuan pendidikan.
- f. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan pada tingkat program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa kerja sama yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- g. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa kerja sama yang dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan nonformal.

Dari ketentuan yang tercantum di dalam Permendikbud No 31 Tahun 2014 Pasal 3 dan 4 di atas perlu diperjelas pengertian lembaga pendidikan dan satuan pendidikan. Di dalam Permendikbud No 31 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa: (1) Lembaga Pendidikan di Indonesia, yang selanjutnya disebut LPI, adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan pendidikan di Indonesia; (2) Lembaga Pendidikan Asing, yang selanjutnya disebut LPA, adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan pendidikan asing; (3) Satuan Pendidikan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut SPK, adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara LPA yang 11 terakreditasi/diakui di negaranya dengan LPI pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Di dalam Permendikbud No 31 Tahun 2014 Pasal 1 di atas dapat diartikan bahwa lembaga pendidikan di samakan dengan satuan pendidikan. Jika demikian adanya, maka kerjasama untuk membentuk SPK tersebut hanya dapat terjadi pada satuan pendidikan yang sudah terakreditasi A dan pembentukan SPK yang sama sekali baru tidak akan terbentuk. Padahal terbentuknya SPK baru yang tidak berawal dari satuan pendidikan terakreditasi A sangat kita harapkan agar SPK sebagai salah satu bentuk investasi di Indonesia dapat bertumbuh subur. Kita tidak bisa menutup mata potensi masyarakat yang sanggup mendirikan atau menyelenggarakan SPK yang baru yang tidak harus berawal dari satuan pendidikan terakreditasi A; potensi itu harus ditampung dan dikembangkan.¹⁵

Kesimpulan

Manfaat kerjasama menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan dan memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak, sehingga keuntungan atau kerugian yang dicapai bersifat proporsional, artinya sesuai dengan peran dan kekuatan masing-masing pihak. Karakteristik kerja sama menuntut beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh anggota, yaitu: adanya kepentingan yang sama, didasari oleh prinsip keadilan, dilandasi oleh sikap saling pengertian, adanya tujuan yang sama, saling membantu, saling melayani, tanggung jawab, saling menghargai, dan kompromi. Di dalam Permendikbud No. 31 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Satuan

¹⁵ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian Kebijakan dan Pendidikan dan Kebudayaan 2017

Pendidikan Kerja Sama (SPK) adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Akyuni, Qurrata. "Pengorganisasian Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2018): 95–96. <http://jurnal.serambimekkah.ac.id>.
- Damayanti, N. "Pentingnya Kerjasama bagi Peningkatan Mutu Pendidikan." *Pendidikan*, n.d., 1–7. <https://osf.io/a6vxe/download>.
- Fauzi, Ahmad. "Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam." *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2017): 42–53. <https://doi.org/10.31538/nidhomulhaq.v2i2.31>.
- Fitria Wulandari, Tatang Hidayat, Muqowim. "Konsep Pendidikan Holistik Dalam Membina Karakter Islam." *Murobbi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2021): 157–80.
- Hadi Purnomo, Hargo Utomo. "Keefektifan Kerjasama Antarlembaga Dalam Operasi Pemulihan Terhadap Bencana Alam: Studi Empiris Di Yogyakarta Dan Jawa Tengah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 23, no. 4 (2008): 404–15. <https://doi.org/10.22146/jieb.6317>.
- Hakim, Muhammad Nur. "MENGEMBANGKAN LEMBAGA PENDIDIKAN (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Dlanggu Mojokerto)." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 121–39. <https://doi.org/10.31538/ndh.v4i1.245>.
- Kemetrician Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian Kebijakan dan Pendidikan dan Kebudayaan 2017
- Meyana, Yulanda Elis, Nurul Ulfatin, Manajemen Pendidikan-pascasarjana Universitas, dan Negeri Malang. "Kerja Sama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Dengan Lembaga Lain Bidang Kejuruan." *Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2017): 157–65.
- Mubarak, Faisal. "Faktor dan Indikator Mutu Pendidikan Islam." *Management of Education* 1, no. 1 (2020): 10–18. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/moe/article/view/342/258>.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
- Ramli, M. "Hakikat pendidikan dan peserta didik." *Tarbiyah Islamiyah* 5, no. 1 (2015): 61–85. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tiftk/article/view/1825>.
- Rosita, Ita, dan Leonard Leonard. "Meningkatkan Kerja Sama Siswa Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share." *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA* 3, no. 1 (2015): 1–10. <https://doi.org/10.30998/formatif.v3i1.108>.
- Sari, Swastika, dan Astuti Wijayanti. "Talking Stick: Hasil Belajar IPA Dan Kemampuan Kerjasama Siswa." *WACANA AKADEMIKA: Majalah Ilmiah*

Kependidikan 1, no. 2 (2017): 175–84. <https://doi.org/10.30738/wa.v1i2.1642>.
Sukardi, dan Sugiyanti. “Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar Berbasis Kurikulum 2013.” *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran* 1, no. 1 (2016): 146–58.